



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Mawan bin Agang, tempat tanggal lahir, Tepas, 21 Januari 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Aman, RT.007 RW.003, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

Hadija binti Muhammad, tempat tanggal lahir, Sapugara Bree, 25 Maret 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Aman, RT.007 RW.003, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Tlg, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Sapugara, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Mawan bin Agang**) berstatus duda mati dalam usia 44 tahun, sesuai Surat Keterangan

Hal. 1 dari 10 hal. Pen.
No. 0046/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dari Kepala Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nomor 474.3/200/52.04.91.2001/IV/2018, tertanggal 23 April 2018, dan Pemohon II (**Hadija binti Muhammad**) berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad berwakil kepada Paman Pemohon II yang bernama Usman, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Syamsu dan Darsono dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk memperoleh Buku Nikah, kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Mawan bin Agung**) dengan Pemohon II (**Hadija binti Muhammad**) yang terjadi pada tanggal 29 April 2018;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer :

**Hal. 2 dari 10 hal. Pen.
No. 0046/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mawan bin Agang) dengan Pemohon II (Hadija binti Muhammad) yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2018, di Dusun Sapugara, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Tlg tertanggal 09 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 474.4/584/DSB/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 474.4/584/DSB/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/200/52.04.91.2001/IV/2018, tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan

**Hal. 3 dari 10 hal. Pen.
No. 0046/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Darsono bin Bolang, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sapugara, RT.006, RW. 002, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi karena saksi adalah sepupu 2 (dua) Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 29 April 2018 di Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad berwakil kepada paman Pemohon II bernama Usman karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dengan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Syamsu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

**Hal. 4 dari 10 hal. Pen.
No. 0046/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon dan juga faktor ekonomi;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah;

Saksi II :

Syamsu bin Salengke, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sapugara, RT.006, RW. 002, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi karena saksi adalah sepupu 2 (dua) Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 29 April 2018 di Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad berwakil kepada paman Pemohon II bernama Usman karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dengan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Darsono dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

**Hal. 5 dari 10 hal. Pen.
No. 0046/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon dan juga faktor ekonomi;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, dan P.2 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para

**Hal. 6 dari 10 hal. Pen.
No. 0046/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 29 April 2018 di Desa Sapugara Bree, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad diwakilkan kepada paman Pemohon II bernama Usman karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dan dihadiri saksi nikah bernama Syamsu dan Darsono dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat setempat, Pemohon I saat pernikahan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti P.3, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2018 di Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad diwakilkan kepada paman Pemohon II bernama Usman karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dan dihadiri saksi nikah bernama Syamsu dan Darsono dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta Para Pemohon belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

**Hal. 7 dari 10 hal. Pen.
No. 0046/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semendah dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدهى و بولى الا نكاح لا

Artinya:

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

كعكسه صدقته امرأه بنكاح العاقل البالغ إقرار ويقبل

Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang

**Hal. 8 dari 10 hal. Pen.
No. 0046/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 29 April 2018 di Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan keabsahannya dan dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Tlg, tanggal 11 Juli 2018, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Taliwang Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mawan bin Agang) dengan Pemohon II (Hadija binti Muhammad) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2018 di Dusun Sapugara, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 Hijriyah. yang terdiri dari **Nurrahmawaty, S. HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nurul Fauziah, S.Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lalu Ahmad Anshari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurul Fauziah, S.Ag.

Nurrahmawaty, S. HI.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen.
No. 0046/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp. 50.000
2. Panggilan Para Pemohon	:	Rp. 244.000
3. Meterai	:	Rp. 6.000
Jumlah		Rp. 300.000,-

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H.

Hal. 10 dari 10 hal. Pen.
No. 0046/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)